



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kebersihan, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEBERSIHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Analisis Jabatan

##### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kebersihan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta pengawasan dan akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Kebersihan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## BAB III

### KEGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;

- c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
- a. Dinas Kebersihan;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kebersihan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.



- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kebersihan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Kebersihan dilaksanakan oleh Biro ORB dan BKD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2016

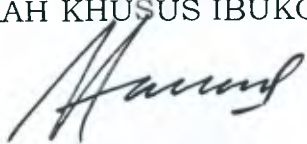
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62062

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 85 TAHUN 2016  
Tanggal 11 April 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  
PADA DINAS KEBERSIHAN

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kepala Dinas	1						
2.	Wakil Kepala Dinas	1						
3.	Sekretaris Dinas		1					
	a. Kepala Subbagian Umum			1				
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	2) Penyimpan Barang				1			
	3) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	4) Pengadministrasi Umum				5			
	5) Pengadministrasi Pimpinan				2			
	6) Penyiap Berkas				2			
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1				
	1) Pengelola Kepegawaian				2			
	2) Pengolah Kepegawaian				3			
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1			
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1				
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2			



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				2			
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendahara Penerimaan				1			
	2) Bendahara Pengeluaran				1			
	3) Pengolah Data Keuangan				4			
	4) Verifikator				1			
	5) Pengadministrasi Keuangan				4			
	6) Penyiap Berkas				1			
4.	Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan		1					
	a. Kepala Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan			1				
	1) Pengelola Pembinaan Teknik Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Pembinaan Teknik Kebersihan				2			
	b. Kepala Seksi Pengembangan Metode Pengelola Kebersihan			1				
	1) Pengelola Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan				2			
	c. Kepala Seksi Pengujian Kebersihan			1				
	1) Analisis Pengujian Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Pengujian Kebersihan				2			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Kebersihan		1					
	a. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Darat			1				
	1) Pengawas Pengendalian Kebersihan Darat				5			
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan Darat				2			
	3) Petugas Operasional				5			
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai			1				
	1) Pengawas Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai				5			
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai				2			
	3) Petugas Operasional				14			
	4) Penyiap Berkas				1			
	5) Pengemudi				6			
	6) Caraka				3			
	c. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan			1				
	1) Penyidik Penindakan Pelanggaran Kebersihan				5			
	2) Pengadministrasi Penindakan Pelanggaran Kebersihan				2			
	3) Petugas Penindakan Pelanggaran Kebersihan				12			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat		1					
	a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat			1				
	1) Pengelola Data Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat				2			
	2) Pengadministrasi Data Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat				1			
	3) Penyiap Berkas				1			
	b. Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat			1				
	1) Pengelola Pengembangan Peran Serta Masyarakat				2			
	2) Pengadministrasi Peran Serta Masyarakat				2			
	c. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan			1				
	1) Pengelola Pembinaan Usaha Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Pembinaan Usaha Kebersihan				2			
7.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan		1					
	a. Kepala Seksi Penyediaan			1				
	1) Pengelola Rencana Kebutuhan Prasarana dan Sarana Kebersihan				2			
	2) Pengadmistrasi Prasarana dan Sarana Kebersihan				3			
	b. Kepala Seksi Penyimpanan dan Penyaluran			1				
	1) Pengelola Penyimpanan dan Penyaluran				2			
	2) Pengadministrasi Penyimpanan dan Penyaluran				2			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c. Kepala Seksi Pemeliharaan			1				
	1) Pengolah Pemeliharaan				2			
	2) Pengadministrasi Pemeliharaan				2			
	3) Petugas Pemeliharaan				5			
8.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				2			
	2) Verifikator				1			
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1			
	6) Pengolah Data Keuangan				2			
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	8) Pengadministrasi Umum				5			
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan			1				
	1) Pengendali Kebersihan				3			
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan				2			
	3) Petugas Operasional				1			
	4) Penyiap Berkas				1			
	5) Caraka				1			
	c. Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan			1				
	1) Koordinator Penanggulangan Kebersihan				2			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kebersihan				2		
	3) Petugas Penanggulangan Kebersihan				1		
	4) Operator Alat Berat				1		
	5) Pengemudi				1		
	d. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Pengolah Data Peran Serta Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Data Peran Serta Masyarakat				1		
	3) Penyiap Berkas				1		
	4) Caraka				1		
	e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kebersihan			1			
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				4		
	3) Caraka				3		
	f. Kepala seksi Dinas Kebersihan Kecamatan (8 Kecamatan)			8			
	1) Pengawas				24		
	2) Pengadministrasi Umum				16		
	3) Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan				16		
	4) Pengemudi				7		
	5) Caraka				16		
9.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Admimistrasi Jakarta Utara		1				



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				2			
	2) Verifikator				1			
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	6) Pengolah Data Keuangan				3			
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	8) Pengadministrasi Umum				5			
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan			1				
	1) Pengendali Kebersihan				3			
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan				3			
	3) Petugas Operasional				2			
	c. Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan			1				
	1) Koordinator Penanggulangan Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kebersihan				3			
	3) Petugas Penanggulangan Kebersihan				1			
	d. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat			1				
	1) Pengolah Data Peran Serta Masyarakat				2			
	2) Pengadministrasi				1			
	e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana			1				
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				2			
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				13			
	3) Petugas Pemeliharaan				11			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	f. Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan (6 Kecamatan)			6				
	1) Pengawas				18			
	2) Pengadministrasi Umum				12			
	3) Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan				10			
10.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				2			
	2) Verifikator				1			
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	6) Pengolah Data Keuangan				3			
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	8) Pengadministrasi Umum				5			
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan			1				
	1) Pengendali Kebersihan				3			
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan				3			
	c. Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan			1				
	1) Koordinator Penanggulangan Kebersihan				2			
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kebersihan				3			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Petugas Penanggulangan Kebersihan				7		
	4) Operator Alat Berat				1		
	d. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Pengolah Data Peran Serta Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi				1		
	e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana			1			
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				13		
	3) Petugas Pemeliharaan				11		
	f. Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan (8 Kecamatan)			8			
	1) Pengawas				24		
	2) Pengadministrasi Umum				16		
	3) Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan				23		
11.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				2		
	2) Verifikator				1		
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	4) Penyimpan Barang				1		
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2		
	6) Pengolah Data Keuangan				3		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	8) Pengadministrasi Umum				5		
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan			1			
	1) Pengendali Kebersihan				3		
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan				3		
	3) Petugas Operasional				4		
	c. Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan			1			
	1) Koordinator Penanggulangan Kebersihan				2		
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kebersihan				3		
	3) Petugas Penanggulangan Kebersihan				2		
	4) Operator Alat Berat				2		
	d. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Pengolah Data Peran Serta Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi				1		
	e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana			1			
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				13		
	3) Petugas Pemeliharaan				11		
	f. Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan (10 Kecamatan)			10			
	1) Pengawas				30		
	2) Pengadministrasi Umum				20		
	3) Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan				13		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				2		
	2) Verifikator				1		
	3) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	4) Penyimpan Barang				1		
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2		
	6) Pengolah Data Keuangan				3		
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	8) Pengadministrasi Umum				5		
	b. Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan			1			
	1) Pengendali Kebersihan				3		
	2) Pengadministrasi Pengendalian Kebersihan				3		
	3) Petugas Operasional				2		
	4) Operator Radio				1		
	c. Kepala Seksi Penanggulangan Kebersihan			1			
	1) Koordinator Penanggulangan Kebersihan				2		
	2) Pengadministrasi Penanggulangan Kebersihan				3		
	3) Petugas Penananggulan Kebersihan				4		
	d. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Pengolah Data Peran serta Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi				1		



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana			1			
	1) Pengolah Prasarana dan Sarana				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				13		
	3) Petugas Pemeliharaan				11		
	f. Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan (10 Kecamatan)			10			
	1) Pengawas				30		
	2) Pengadministrasi Umum				20		
	3) Petugas Operasional Kebersihan Kecamatan				20		
13.	Kepala Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	b. Kepala Seksi Penanganan Kebersihan			1			
	c. Kepala Seksi Pengendalian Peran Serta Masyarakat			1			
14.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan Badan Air		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				1		
	6) Pengolah Data Keuangan				2		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7) Pengadministrasi Umum				2			
	8) Caraka				1			
	b. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah I				1			
	1) Pengawas Wilayah I				5			
	2) Pengadministrasi Wilayah I				2			
	3) Petugas Operasional				10			
	c. Kepala Satuan Pelaksana Wilayah II				1			
	1) Pengawas Wilayah II				5			
	2) Pengadministrasi Wilayah II				2			
	3) Petugas Operasional				10			
15.	Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara Penerimaan				1			
	2) Bendahara Pengeluaran				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	5) Penyimpan Barang				1			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Pengolah Data Keuangan				1			
	8) Pengadministrasi Umum				2			
	9) Penyiap Berkas				2			
	10) Pengemudi				1			

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Komposting 3R serta Pemrosesan Akhir				1			
	1) Pengawas Pengolahan Energi Komposting 3R serta Pemrosesan Akhir				2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pengolahan Energi Komposting 3R serta Pemrosesan Akhir				2			
	3) Petugas Pengolahan Energi Komposting 3R serta Pemrosesan Akhir				8			
	c. Kepala Satuan Pelaksana Kawasan Mandiri				1			
	1) Pengawas Kawasan Mandiri				2			
	2) Pengadministrasi Kawasan Mandiri				2			
	3) Petugas Operasional Kawasan Mandiri				4			
	Jumlah	2	13	88	828	0		
	Jumlah Total	931						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA